



Penerapan Literasi Digital Oleh Pegawai Dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja: Studi Kasus Di Kpu Kabupaten Bandung Barat

Mega Sriabanon¹, Alda Ramadhika²

Universitas Teknologi Digital Bandung^{1,2}

Received: 06 Februari 2026
Revised: 16 Februari 2026
Accepted: 28 Februari 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi digital, proses adaptasi terhadap penggunaan teknologi digital, serta dampaknya terhadap kepuasan kerja pegawai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga orang anggota KPU serta observasi langsung terhadap aktivitas digital pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki keterampilan dasar dalam penggunaan perangkat digital dan aplikasi kerja seperti Microsoft Office, Google Workspace, dan sistem informasi pemilu. Pegawai juga aktif berpartisipasi dalam ruang kolaborasi digital serta menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang baik dalam konteks daring. Namun, masih terdapat tantangan dalam adaptasi teknologi, terutama terkait pemerataan fasilitas digital dan pelatihan teknis yang belum merata. Proses adaptasi terhadap digitalisasi kerja memengaruhi tingkat kepuasan pegawai, khususnya dalam aspek pekerjaan itu sendiri, supervisi, serta hubungan kerja antarpegawai. Dukungan atasan, semangat kolaboratif, dan sistem kerja yang fleksibel menjadi faktor penting dalam membangun kepuasan kerja di era digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya program literasi digital yang terstruktur dan merata untuk meningkatkan kesiapan seluruh pegawai dalam menghadapi transformasi teknologi di lingkungan kerja.

Kata Kunci: literasi digital, adaptasi teknologi, kepuasan kerja, pegawai, KPU Kabupaten Bandung Barat.

(*) Corresponding Author: megal1211183@digitechuniversity.ac.id

How to Cite: Sriabanon, M., & Ramadhika, A. (2026). Penerapan Literasi Digital Oleh Pegawai Dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja: Studi Kasus Di Kpu Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(3.D), 61-78. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12776>.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Era digital menuntut setiap individu, khususnya karyawan di berbagai sektor, untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap teknologi. Literasi digital menjadi kompetensi mendasar yang harus dimiliki agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam menunjang produktivitas dan efisiensi kerja. Di lingkungan kerja modern, literasi digital tidak lagi dianggap sebagai keunggulan tambahan, melainkan sebagai kebutuhan pokok untuk mendukung proses kerja yang lebih efektif dan efisien (Fadhillah et al., 2024)

Transformasi digital di sektor pemerintahan menjadi suatu keharusan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, tidak terlepas dari tuntutan tersebut. Digitalisasi proses administrasi dan tata kelola menjadi langkah strategis yang diambil untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, adaptasi karyawan terhadap perubahan teknologi ini menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua karyawan memiliki tingkat literasi digital yang memadai untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin kompleks (Apriyani et al., 2022).

Perubahan sistem kerja yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi menuntut karyawan untuk menguasai berbagai keterampilan digital, mulai dari pengoperasian perangkat lunak perkantoran hingga pemanfaatan platform digital untuk komunikasi dan koordinasi kerja. Namun, proses adaptasi ini tidak selalu berjalan mulus. Hambatan yang kerap muncul meliputi keterbatasan akses terhadap perangkat digital, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, serta adanya resistensi dari sebagian karyawan yang merasa nyaman dengan metode kerja konvensional. Faktor-faktor ini berkontribusi pada ketimpangan kompetensi digital di lingkungan kerja, yang dapat memengaruhi kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan (B. Sutrisno, 2021)

Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga merupakan persoalan manajerial dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dalam perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), proses adaptasi terhadap teknologi digital merupakan bagian dari strategi pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Organisasi dituntut untuk tidak hanya menyediakan infrastruktur digital, tetapi juga menyusun program pelatihan dan pengembangan (training and development) yang relevan dengan kebutuhan era digital (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2020). Kegagalan dalam membangun literasi digital sebagai bagian dari pengembangan SDM dapat menyebabkan resistensi terhadap perubahan, menurunnya performa, serta ketimpangan adaptasi antar individu (Stone, Deadrick, Lukaszewski, & Johnson, 2021). Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital pegawai harus menjadi bagian integral dari kebijakan MSDM untuk memastikan proses transformasi teknologi berjalan merata dan mampu meningkatkan kepuasan kerja.

Minimnya program pelatihan literasi digital yang berkelanjutan juga menjadi salah satu penyebab lambatnya proses adaptasi. Banyak organisasi yang menganggap bahwa pemberian perangkat teknologi saja sudah cukup untuk mendukung digitalisasi, tanpa mempertimbangkan kebutuhan akan pelatihan yang memadai. Padahal, tanpa pemahaman yang baik mengenai penggunaan teknologi tersebut, potensi dari digitalisasi tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks KPU Kabupaten Bandung Barat, hal ini dapat menghambat proses kerja, memperlambat alur informasi, serta mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab karyawan (Shidqi et al., 2023).

Selain keterbatasan pelatihan, faktor usia dan latar belakang pendidikan juga memengaruhi tingkat adaptasi karyawan terhadap literasi digital. Karyawan yang lebih muda cenderung lebih cepat beradaptasi karena sudah terbiasa dengan teknologi sejak dini, sementara karyawan yang lebih senior memerlukan waktu lebih lama untuk memahami dan menguasai perangkat serta aplikasi digital yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.

Dalam Manajemen SDM modern, pendekatan berbasis kebutuhan individu seperti usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman digital dianggap penting dalam merancang pelatihan yang efektif (Kaufman, Guerra-López, & Watkins, 2021). Karyawan dari generasi berbeda membutuhkan strategi pelatihan yang disesuaikan agar proses adaptasi berlangsung optimal. Kurangnya personalisasi dalam pengembangan SDM dapat memperlebar kesenjangan digital dan menghambat transformasi organisasi.

Adaptasi yang tidak merata terhadap teknologi digital juga berpotensi menimbulkan stres kerja. Karyawan yang merasa tertinggal dalam memahami teknologi cenderung mengalami tekanan mental yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepuasan kerja. Penurunan kepuasan kerja ini berisiko memengaruhi kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Shidqi, Darmastuti, dan Wicaksono (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perusahaan memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja, terutama ketika proses adaptasi didukung oleh pelatihan yang memadai.

Dalam konteks KPU Kabupaten Bandung Barat, digitalisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pekerjaan, mulai dari penggunaan sistem informasi pemilu, pengarsipan dokumen secara digital, hingga pemanfaatan platform komunikasi daring untuk mendukung koordinasi antar karyawan. Meski demikian, tidak semua pegawai merespons perubahan ini dengan tingkat kenyamanan dan kesiapan yang sama. Sebagian di antaranya mengalami kendala dalam memahami prosedur digital baru, yang berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

Melalui penelitian awal yang dilakukan peneliti dengan metode wawancara terhadap beberapa anggota KPU Kabupaten Bandung Barat dan didukung oleh observasi langsung di lingkungan kerja, ditemukan bahwa keterbatasan infrastruktur digital serta belum meratanya dukungan teknis di beberapa unit kerja turut memengaruhi proses adaptasi terhadap teknologi. Kondisi ini menimbulkan potensi ketimpangan akses informasi dan kolaborasi, yang dapat berdampak terhadap dinamika kerja antar karyawan.

Hasil temuan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital secara menyeluruh. Keberhasilan adaptasi terhadap penggunaan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis individu, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan dalam bentuk pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penciptaan budaya kerja yang mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi digital.

Lebih jauh, kemampuan beradaptasi terhadap literasi digital juga memengaruhi kepuasan kerja karyawan. Dalam wawancara yang dilakukan, responden menyampaikan bahwa digitalisasi membawa kemudahan dalam kolaborasi dan fleksibilitas kerja, namun implementasi yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana tingkat literasi digital karyawan, bagaimana proses adaptasi berlangsung, serta dampaknya terhadap kepuasan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat.

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami tingkat literasi digital karyawan di KPU Kabupaten Bandung Barat dan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh digitalisasi dalam lingkungan kerja. Penelitian ini mengeksplorasi proses adaptasi yang dijalani karyawan, termasuk strategi yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru serta hambatan yang dihadapi selama proses tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan adaptasi, seperti usia, latar belakang pendidikan, akses terhadap perangkat digital, kualitas pelatihan yang diterima, serta budaya kerja yang diterapkan. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika adaptasi yang terjadi di lingkungan kerja KPU.

Dampak dari proses adaptasi ini terhadap kepuasan kerja menjadi perhatian utama, dengan mengevaluasi hubungan antara keberhasilan adaptasi digital dengan aspek-aspek kepuasan kerja seperti rasa percaya diri dalam melaksanakan tugas, peningkatan efisiensi kerja, serta persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja yang lebih modern dan terintegrasi secara digital.

Penelitian ini juga mengkaji peran manajemen dalam mendukung proses adaptasi, termasuk penyediaan fasilitas teknologi yang memadai, akses terhadap pelatihan berkelanjutan, serta penciptaan budaya kerja yang mendukung inovasi dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, perhatian diberikan pada pentingnya infrastruktur digital yang merata untuk memastikan kesetaraan akses di seluruh unit kerja.

Peran manajemen, khususnya dalam bidang MSDM, sangat krusial dalam membangun lingkungan kerja yang mendukung adopsi teknologi. Dukungan seperti coaching, mentoring, serta pelatihan berbasis kebutuhan kerja menjadi faktor penentu dalam menciptakan iklim kerja

digital yang adaptif dan partisipatif (Ulrich, Brockbank, Johnson, & Younger, 2020). Manajemen yang proaktif dalam menerapkan kebijakan MSDM berbasis digital akan mampu menciptakan kepuasan kerja yang lebih tinggi melalui sistem kerja yang efisien dan modern.

Berdasarkan temuan penelitian, fokus ini juga diarahkan untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung adaptasi karyawan terhadap literasi digital. Rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan digital karyawan, memperbaiki proses kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif, inklusif, dan produktif di era digital.

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Literasi Digital Oleh Pegawai Dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja: Studi Kasus Di Kpu Kabupaten Bandung Barat”**

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai adaptasi pegawai terhadap literasi digital dalam meningkatkan kepuasan kerja, khususnya di lingkungan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman subjektif pegawai secara lebih komprehensif dan holistik.

Menurut Walidin, Saifullah & Tabrani dalam Muhammad Rijal Fadli (2021), pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena sosial, dengan tujuan menciptakan gambaran yang kompleks dan menyeluruh terhadap subjek yang diteliti. Data yang diperoleh melalui pendekatan ini disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggunakan kata-kata, bukan angka, sehingga sangat relevan digunakan dalam penelitian yang berfokus pada persepsi, sikap, dan proses adaptasi individu.

Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci (human instrument) dalam proses pengumpulan data, karena keterlibatan langsung peneliti dalam interaksi dengan partisipan sangat penting untuk menangkap makna-makna subjektif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Peneliti dituntut untuk memiliki wawasan teoritik dan konseptual yang memadai guna menginterpretasi dinamika adaptasi digital dan kaitannya dengan tingkat kepuasan kerja pegawai. Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian deskriptif.

Menurut Sugiyono dalam Reusi (2019), penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, deskriptif analitis digunakan untuk menguraikan bagaimana proses adaptasi terhadap literasi digital dilakukan oleh pegawai, faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya, serta bagaimana adaptasi tersebut berdampak terhadap kepuasan kerja mereka di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai hubungan antara literasi digital, proses adaptasi pegawai, dan kepuasan kerja, serta dinamika sosial dan organisasi yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengaitkan hasil temuan di lapangan dengan teori-teori serta kerangka konseptual yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada bagian ini, hasil wawancara dan observasi akan dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, serta menggambarkan bagaimana kondisi nyata di lingkungan kerja KPU Kabupaten Bandung Barat berkaitan dengan literasi digital karyawan.

Tingkat Literasi Digital Karyawan di KPU Kabupaten Bandung Barat

Fokus utama pembahasan pada subbagian ini adalah pada rumusan masalah pertama, yaitu "Bagaimana tingkat literasi digital karyawan di KPU Kabupaten Bandung Barat?". Untuk menjawabnya, pembahasan akan dilakukan berdasarkan dimensi-dimensi literasi digital yang relevan, yakni: keterampilan fungsional (*functional skills*), komunikasi digital (*communication*), pemahaman audiens dalam konten digital, dan kemampuan mencari serta memilih informasi (*the ability to find and select information*).

1. keterampilan fungsional (*functional skills*)

Keterampilan fungsional merupakan dimensi paling mendasar dalam literasi digital yang berfokus pada kapasitas teknis individu dalam menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) digital guna menunjang produktivitas kerja. Dalam konteks organisasi pemerintahan seperti KPU Kabupaten Bandung Barat, dimensi ini menjadi elemen kunci yang memastikan kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, koordinasi teknis, serta pelayanan publik berbasis digital.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa para pegawai telah memiliki tingkat penguasaan yang memadai terhadap keterampilan fungsional ini. Mereka menunjukkan kecakapan dalam mengoperasikan komputer, laptop, dan printer, serta terbiasa menggunakan perangkat lunak kerja seperti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Workspace (Docs, Drive, Sheets, Meet), hingga sistem aplikasi khusus seperti e-SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).

Keterampilan ini tidak hanya bersifat teknis-operasional, melainkan telah menjadi bagian dari rutinitas dan budaya kerja yang mengarah pada efisiensi dan akuntabilitas birokrasi. Pegawai mampu menyusun, memproses, menyimpan, dan mengirimkan dokumen kerja secara digital, serta dapat mengikuti sistem koordinasi melalui platform daring.

Aktivitas seperti membuat laporan, presentasi, atau mengelola data pemilih secara digital menunjukkan bahwa literasi digital fungsional telah melekat pada sistem kerja mereka. Temuan ini selaras dengan pemikiran Hague dalam Nasionalita & Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa *functional skills and beyond* mencakup kemampuan dasar dalam mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) secara optimal untuk mendukung pekerjaan dan kehidupan sosial. Pegawai tidak hanya mampu mengakses alat digital, namun juga telah menunjukkan kemahiran dalam menavigasi sistem digital berbasis institusi, termasuk mengenali struktur menu aplikasi, memahami alur data, serta menjaga keamanan operasional digital.

Dalam perspektif Bawden (dalam Lestari et al., 2021), keterampilan fungsional dalam literasi digital juga mencakup kemampuan membaca informasi non-linear, mengolah data secara dinamis, serta merasa nyaman menggunakan teknologi digital sebagai sarana komunikasi dan publikasi. Ini terlihat dari kebiasaan pegawai KPU yang aktif menggunakan platform daring untuk koordinasi internal (melalui WhatsApp Group, Zoom, Google Meet), serta dalam menyebarkan informasi publik melalui media digital institusi. Lebih lanjut, keterampilan fungsional tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi fondasi dari dimensi literasi digital yang lebih kompleks.

Takariani et al. (2023) menjelaskan bahwa asesmen literasi digital dibangun secara bertingkat, dimulai dari keterampilan dasar seperti fungsional skills, kemudian bergerak menuju dimensi kolaboratif, kreatif, berpikir kritis, hingga aspek keamanan digital. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan fungsional membuka jalan bagi pegawai untuk mengembangkan kapasitas digitalnya secara menyeluruh.

Dalam konteks Revolusi Industri 4.0 dan era digitalisasi administrasi publik, keterampilan ini menjadi syarat wajib bagi setiap individu yang ingin tetap relevan di lingkungan kerja modern. Anggia et al. (2022) menyebutkan bahwa literasi digital bukan hanya soal keahlian teknis, tetapi juga tentang kesiapan mental dan adaptif dalam menghadapi perubahan sistem dan pola kerja. Pegawai KPU yang mampu menggunakan perangkat digital tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, tetapi juga menunjukkan sikap profesional, fleksibel, dan visioner terhadap arah perkembangan digital di institusinya.

Selain itu, keterampilan fungsional terbukti memiliki dampak langsung terhadap kepuasan kerja. Para pegawai yang terbiasa menggunakan teknologi digital mengaku merasa lebih ringan, cepat, dan efisien dalam menyelesaikan tugas. Mereka juga merasa dihargai karena memiliki kemampuan yang diandalkan oleh rekan kerja, serta merasa lebih percaya diri karena mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa ketergantungan tinggi pada bantuan teknis. Kondisi ini sesuai dengan Covello (2010) yang menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam membentuk budaya kerja yang produktif dan adaptif di era digital.

Dengan demikian, keterampilan fungsional bukan hanya indikator literasi digital, melainkan refleksi dari kesiapan individu dalam beradaptasi dengan era digitalisasi birokrasi. Dalam kasus KPU Kabupaten Bandung Barat, keterampilan ini telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi kerja, kualitas layanan publik, dan kepuasan pegawai secara individu.

2. komunikasi digital (*communication*)

Dalam lingkungan kerja modern, termasuk di instansi pemerintahan seperti KPU Kabupaten Bandung Barat, komunikasi digital telah menjadi sarana utama dalam mendukung koordinasi, sosialisasi, serta pertukaran informasi internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian, para pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat menunjukkan kompetensi yang baik dalam memanfaatkan media komunikasi digital. Platform seperti WhatsApp, email, Zoom, dan Google Meet digunakan secara intensif untuk koordinasi harian, rapat virtual, berbagi dokumen, serta menyampaikan instruksi teknis antar divisi. Para pegawai mampu menyesuaikan gaya komunikasi mereka sesuai dengan konteks media dan kebutuhan audiens. Misalnya, untuk komunikasi yang bersifat cepat dan informal digunakan WhatsApp Group, sementara untuk diskusi resmi atau presentasi dipilih Zoom atau Google Meet.

Kemampuan ini mencerminkan literasi komunikasi digital yang tidak hanya berfokus pada penggunaan alat, tetapi juga mencakup keterampilan memahami karakteristik audiens dan memilih strategi komunikasi yang tepat. Pegawai KPU mampu menyusun pesan secara ringkas namun informatif, menjaga etika komunikasi digital, serta memperhatikan unsur kesantunan dan netralitas, terutama dalam forum-forum daring yang melibatkan banyak pihak dengan latar belakang berbeda.

Temuan ini sejalan dengan definisi Hague dalam Nasionalita & Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa dimensi *communication* dalam literasi digital mencakup dua aspek, yakni kemampuan untuk berkomunikasi melalui media digital, serta pemahaman terhadap audiens digital. Artinya, seorang individu yang literat secara digital tidak hanya bisa mengirim pesan melalui teknologi, tetapi juga mampu memperkirakan dampak pesan tersebut terhadap audiensnya, baik dari segi isi, bahasa, maupun media yang digunakan.

Lebih jauh, Bawden (dalam Lestari et al., 2021) menyebut bahwa literasi digital yang baik harus mencakup kenyamanan individu dalam berkomunikasi dan mempublikasikan informasi

melalui media digital. Hal ini tercermin dalam sikap pegawai KPU yang aktif menyampaikan ide, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam komunikasi daring, baik dalam bentuk rapat formal maupun forum informal.

Keterampilan ini menjadi indikator bahwa mereka telah melewati tahap adaptasi teknologi dan mampu membentuk interaksi profesional secara digital. Komunikasi digital juga menjadi fondasi penting dalam kolaborasi lintas divisi, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program sosialisasi kepemiluan yang berbasis media daring. Takariani et al. (2023) menjelaskan bahwa dalam literasi digital tingkat lanjut, komunikasi efektif melalui media digital menjadi elemen kunci untuk menjamin keberhasilan kerja tim, terutama ketika komunikasi dilakukan secara asinkron dan lintas wilayah.

Dalam konteks pelayanan publik, kemampuan komunikasi digital pegawai KPU juga memiliki implikasi langsung terhadap citra institusi. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara akurat, sopan, dan efisien melalui media digital turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga. Anggia et al. (2022) menyatakan bahwa kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan akurat dalam dunia digital sangat krusial, terutama mengingat arus informasi yang begitu cepat dan masif di era digitalisasi birokrasi.

Selain itu, penggunaan komunikasi digital yang etis dan inklusif oleh pegawai KPU menunjukkan adanya kesadaran budaya yang tinggi. Mereka berhati-hati dalam penggunaan kata, simbol, dan bahasa, khususnya saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang berasal dari latar belakang sosial, budaya, dan geografis yang berbeda. Sikap ini mencerminkan keterampilan komunikasi digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan kultural. Dengan demikian, dimensi komunikasi digital dalam literasi digital tidak hanya membantu pegawai menjalankan tugas dengan efisien, tetapi juga memperkuat kolaborasi, mempercepat koordinasi, dan memperbesar jangkauan interaksi lintas wilayah. Kemampuan ini sangat relevan dengan tuntutan kerja di era digital yang dinamis, serta turut berkontribusi terhadap meningkatnya kepuasan kerja pegawai karena mereka merasa mampu menyampaikan ide, berkontribusi, dan dihargai dalam proses komunikasi digital institusional.

3. kemampuan mencari serta memilih informasi (*the ability to find and select information*).
Kemampuan mencari dan memilih informasi merupakan salah satu aspek esensial dalam literasi digital, terutama dalam konteks kerja birokrasi yang menuntut ketepatan data, validitas sumber, dan ketajaman analisis informasi. Dalam penelitian ini, pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat menunjukkan kompetensi yang baik dalam menavigasi berbagai sumber informasi digital, mengevaluasi kebenarannya, serta menyeleksi informasi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara, pegawai secara aktif mencari informasi dari berbagai sumber terpercaya seperti website resmi KPU RI (kpu.go.id), JDIH KPU, serta referensi peraturan perundang-undangan yang tersedia secara daring. Dalam prosesnya, mereka tidak langsung mempercayai informasi yang diterima melalui media digital, melainkan melakukan validasi silang dengan sumber lain dan berdiskusi bersama tim untuk memastikan akurasi serta relevansinya.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa praktik kerja mereka telah mencerminkan proses pencarian dan pemilahan informasi secara kritis dan sistematis. Temuan ini sesuai dengan pendapat Hague dalam Nasionalita & Nugroho (2020) yang menekankan bahwa dimensi *the ability to find and select information* mengacu pada kemampuan seseorang dalam mencari, menemukan, serta menyeleksi informasi secara tepat dan efektif dalam lingkungan digital. Kemampuan ini bukan hanya tentang keterampilan teknis menggunakan mesin pencari,

tetapi juga menyangkut kecermatan dalam menilai kredibilitas sumber, keaktualan data, serta kecocokan konteks informasi dengan kebutuhan kerja.

Lebih lanjut, literasi digital dalam konteks ini juga melibatkan evaluative literacy, yaitu kemampuan untuk menganalisis kualitas informasi sebelum digunakan atau disebarkan. Hal ini penting dalam lingkungan kerja seperti KPU yang menangani informasi sensitif terkait pemilu dan data pemilih.

Bawden (dalam Lestari et al., 2021) menyatakan bahwa individu yang literat secara digital harus memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dari berbagai sumber serta berpikir kritis dalam mengevaluasi kebenaran dan kepentingan informasi tersebut terhadap tugas yang sedang dijalankan.

Dalam praktiknya, pegawai KPU menunjukkan pemahaman yang baik dalam membedakan antara informasi resmi dan informasi spekulatif, serta memiliki kebiasaan mencari referensi tambahan guna memperkuat validitas data. Misalnya, sebelum menyusun materi sosialisasi atau laporan kegiatan, pegawai melakukan pengecekan data ke sumber primer dan menggunakan teknik perbandingan informasi.

Mereka juga memanfaatkan fitur-fitur digital seperti filter pencarian lanjutan di Google, akses ke e-book peraturan melalui JDIH, dan diskusi dalam forum daring resmi untuk memperdalam pemahaman. Menurut Takariani et al. (2023), kemampuan mencari dan menyeleksi informasi merupakan salah satu indikator literasi digital lanjutan yang berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).

Dalam hal ini, pegawai KPU menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber menjadi dasar argumentasi, laporan, maupun kebijakan teknis kepemiluan. Di era digital yang ditandai oleh banjir informasi (information overload), kemampuan menyaring informasi menjadi keterampilan yang sangat penting agar tidak terjebak dalam disinformasi, hoaks, atau bias kognitif. Hal ini ditegaskan pula oleh Anggia et al. (2022) bahwa kemampuan literasi digital tidak hanya terkait dengan mengakses informasi, tetapi juga memahami cara memilah, mengevaluasi, dan memanfaatkannya dengan bijak.

Dalam konteks pekerjaan di lingkungan KPU, keterampilan ini menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan produk kerja yang akurat, objektif, dan informatif. Kemampuan memilih informasi yang relevan membantu pegawai dalam menghasilkan output kerja yang tidak hanya efisien, tetapi juga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan diri dan kepuasan kerja juga meningkat karena mereka merasa memiliki kendali atas informasi yang mereka kelola dan gunakan.

Dengan demikian, dimensi the ability to find and select information bukan hanya merefleksikan kecakapan teknis, tetapi juga mengindikasikan adanya pola pikir kritis dan kesadaran terhadap pentingnya kualitas informasi dalam menunjang kinerja institusi. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi digital yang kredibel dan responsif di tengah transformasi digital pemerintahan.

Proses Penerapan Teknologi Digital Terhadap Karyawan di Lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat

Dalam era digital yang terus berkembang, organisasi publik seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat dituntut untuk beradaptasi secara sistematis dengan kemajuan teknologi informasi.

Penerapan teknologi digital tidak hanya menjadi aspek teknis semata, tetapi juga melibatkan perubahan pola kerja, penyesuaian budaya organisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, proses adaptasi karyawan terhadap penerapan teknologi

digital menjadi komponen penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada bagaimana karyawan di KPU Kabupaten Bandung Barat menjalani proses penerapan teknologi digital dalam rutinitas kerja mereka, khususnya dalam konteks kreativitas, kolaborasi, serta pemahaman sosial dan budaya yang berlandaskan prinsip-prinsip literasi digital.

Temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi menunjukkan bahwa para karyawan tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi digital, tetapi juga mulai mengintegrasikannya ke dalam alur kerja secara aktif dan inovatif. Proses ini mencerminkan dinamika adaptasi yang dipengaruhi oleh kompetensi individu, dukungan struktural, serta kebutuhan organisasi dalam menyongsong transformasi digital secara menyeluruh.

1. Kreativitas (*Creativity*)

Kreativitas dalam konteks literasi digital mengacu pada kemampuan individu untuk menciptakan konten atau solusi berbasis teknologi secara inovatif dan efektif. Dalam lingkungan kerja digital seperti di KPU Kabupaten Bandung Barat, kreativitas tidak hanya dilihat dari sisi artistik atau estetika, tetapi juga dari kemampuan pegawai untuk memecahkan masalah, menyusun konten informatif, dan menyederhanakan proses kerja melalui pendekatan teknologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pegawai memanfaatkan beragam aplikasi dan platform digital seperti Canva, PowerPoint, Trello, dan Notion dalam merancang presentasi, menyusun laporan, serta merancang strategi komunikasi digital yang sesuai dengan kebutuhan audiens.

Mereka menunjukkan kecakapan dalam menggabungkan elemen visual dan verbal secara harmonis untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang berbeda seperti pemilih pemula, petugas lapangan, hingga masyarakat adat. Dimensi kreativitas ini sejalan dengan pendapat Hague dalam Nasionalita & Nugroho (2020), yang menekankan bahwa kreativitas dalam literasi digital mencakup dua aspek penting: pertama, kemampuan menghasilkan produk atau keluaran digital dalam berbagai format dan model; kedua, kemampuan berpikir kreatif dan imajinatif, yang melibatkan perencanaan, eksplorasi ide, dan kontrol terhadap proses kreatif tersebut.

Kreativitas juga mencerminkan kemampuan untuk merespons tantangan dengan pendekatan baru. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan Google Form oleh pegawai untuk merekap partisipasi masyarakat secara efisien, serta pembuatan konten visual interaktif guna meningkatkan pemahaman publik terhadap materi sosialisasi pemilu. Praktik ini menunjukkan bahwa pegawai tidak hanya pasif menerima teknologi, tetapi aktif memodifikasi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan operasional.

Bawden (dalam Lestari et al., 2021) juga menekankan pentingnya kemampuan untuk membaca dan memahami informasi yang dinamis serta menyusunnya kembali dalam bentuk yang komunikatif dan menarik. Dalam hal ini, para pegawai menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengemasnya dengan pendekatan visual yang sesuai dengan karakteristik audiens baik dalam konteks formal, edukatif, maupun kampanye sosial.

Kreativitas digital erat kaitannya dengan design thinking dan kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel. Menurut Takariani et al. (2023), dalam kerangka asesmen literasi digital, kreativitas merupakan bagian dari kompetensi lanjutan yang menunjukkan bagaimana individu dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan ide-ide baru, menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif, dan menghasilkan keluaran kerja yang inovatif.

Di era kerja hibrida dan digitalisasi tata kelola pemerintahan, kreativitas bukan lagi keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan utama. Anggia et al. (2022) menegaskan bahwa literasi digital yang baik harus mendorong individu untuk berpikir kreatif, responsif, dan solutif dalam menghadapi tantangan kerja. Dalam hal ini, pegawai KPU menunjukkan bahwa kreativitas digital mereka berperan besar dalam menciptakan suasana kerja yang lebih dinamis, efisien, dan kolaboratif.

Praktik kreatif juga memperkuat kepuasan kerja. Ketika pegawai diberi ruang untuk berinovasi, mereka cenderung merasa lebih dihargai dan termotivasi. Rasa percaya diri pun meningkat karena mereka mampu menciptakan solusi yang berdampak nyata bagi institusi. Hal ini sesuai dengan prinsip *self-efficacy* dalam teori kepuasan kerja, di mana individu merasa puas ketika mampu menyelesaikan tugas dengan pendekatan yang mereka ciptakan sendiri.

Dengan demikian, kreativitas dalam literasi digital bukan hanya soal menciptakan bentuk visual menarik, tetapi juga mencerminkan cara berpikir baru yang sistematis, reflektif, dan adaptif dalam menyelesaikan pekerjaan. Dimensi ini menjadi penentu utama dalam keberhasilan transformasi digital di lingkungan birokrasi publik seperti KPU, sekaligus pendorong motivasi intrinsik yang berdampak pada kinerja dan kepuasan kerja pegawai.

2. Kolaborasi (*Collaboration*)

Kolaborasi merupakan salah satu dimensi penting dalam literasi digital yang menunjukkan sejauh mana individu mampu bekerja sama secara efektif di ruang digital. Dalam konteks organisasi publik seperti KPU Kabupaten Bandung Barat, kolaborasi digital bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan mencakup kemampuan untuk menyampaikan ide, menegosiasikan keputusan, serta menyelesaikan tugas secara kolektif dengan memanfaatkan media digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan KPU telah menunjukkan kemampuan kolaboratif yang kuat dalam penggunaan berbagai platform komunikasi dan koordinasi digital. Platform seperti WhatsApp Group, Google Workspace (Drive, Docs, Sheets), dan Zoom telah menjadi sarana utama bagi para pegawai untuk bertukar informasi, merumuskan strategi, hingga menyusun laporan bersama secara daring.

Misalnya, dalam proses penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pemilu, beberapa divisi secara aktif berbagi dokumen, menyusun konsep konten, dan mengevaluasi program secara terpadu dalam forum daring yang interaktif. Hal ini menunjukkan adanya kultur kerja kolaboratif yang tidak hanya bergantung pada tatap muka, tetapi juga berjalan dinamis melalui media digital.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Hague dalam Nasionalita & Nugroho (2020) yang menegaskan bahwa kolaborasi dalam literasi digital mencakup kemampuan berpartisipasi dalam ruang digital serta menegosiasikan ide dengan orang lain dalam satu kelompok. Pegawai tidak hanya aktif dalam forum daring, tetapi juga memiliki peran yang berbeda-beda seperti sebagai notulen, moderator, pengarah diskusi, hingga fasilitator komunikasi antardivisi. Kolaborasi semacam ini memperkuat kerja tim dan mempercepat proses penyelesaian tugas.

Selain itu, Takariani et al. (2023) menyebutkan bahwa kemampuan kolaborasi digital merupakan bagian dari literasi tingkat menengah yang mengindikasikan kematangan dalam adaptasi digital. Artinya, pegawai yang mampu berkolaborasi secara digital telah melampaui tahap keterampilan dasar dan menunjukkan kemampuan sosial yang terintegrasi dengan teknologi. Ini penting mengingat kolaborasi yang efektif secara digital menjadi salah satu penentu keberhasilan transformasi digital organisasi.

Bawden (dalam Lestari et al., 2021) juga menekankan pentingnya membangun jejaring sosial berbasis teknologi dalam lingkungan kerja untuk memperkuat fungsi koordinatif dan inovatif organisasi. Dalam praktiknya, pegawai KPU secara aktif menggunakan jaringan ini

tidak hanya untuk internal, tetapi juga dalam menjalin koordinasi dengan pihak eksternal seperti PPK, PPS, dan mitra kerja lainnya.

Kolaborasi digital yang terjadi di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat mencerminkan adanya kesadaran kolektif dalam membangun efisiensi kerja dan komunikasi terbuka melalui media digital. Budaya ini memperkuat solidaritas kerja dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang responsif terhadap perubahan teknologi. Dengan demikian, kolaborasi digital bukan hanya meningkatkan produktivitas organisasi, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil kerja bersama.

3. Pemahaman budaya dan social (*Cultural and social understanding*)

Pemahaman budaya dan sosial merupakan dimensi penting dalam literasi digital yang mencerminkan kesadaran individu terhadap nilai-nilai budaya, norma sosial, dan keberagaman dalam ruang digital. Dalam lingkungan kerja pemerintahan seperti KPU Kabupaten Bandung Barat yang berinteraksi dengan masyarakat luas dari berbagai latar belakang, pemahaman ini menjadi aspek krusial untuk menjaga komunikasi yang inklusif dan etis, terutama saat menggunakan media digital dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil penelitian, para pegawai menunjukkan sensitivitas budaya dan sosial dalam berinteraksi secara digital. Mereka menjaga etika komunikasi, memilih diksi dengan hati-hati, serta menyesuaikan gaya penyampaian informasi sesuai dengan karakteristik audiens. Contohnya, saat menyusun konten digital untuk kegiatan sosialisasi pemilu, pegawai menyesuaikan desain visual dan gaya bahasa berdasarkan segmentasi sasaran, seperti pemilih pemula, masyarakat adat, atau kelompok rentan.

Ini menunjukkan adanya kesadaran untuk membangun komunikasi digital yang tidak hanya informatif tetapi juga menghormati keberagaman sosial-budaya audiens. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hague dalam Nasionalita & Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa *cultural and social understanding* dalam literasi digital mengharuskan pengguna untuk memahami konteks budaya dan sosial serta menghargai perbedaan dalam interaksi digital.

Pemahaman ini mencakup penggunaan bahasa yang netral dan tidak diskriminatif, serta kesadaran akan perbedaan nilai dan cara pandang masyarakat di ruang digital. Lestari et al. (2021) juga menekankan bahwa pemahaman budaya dan sosial dalam literasi digital tidak hanya melibatkan pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga bagaimana individu mampu menyesuaikan komunikasi, konten, dan tindakan digital mereka agar selaras dengan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, pegawai KPU telah menerapkan prinsip tersebut dengan cara menghindari penggunaan simbol atau istilah lokal yang mungkin tidak dipahami atau menimbulkan kesalahpahaman, serta menjaga nada komunikasi yang sopan dan profesional di media sosial maupun platform internal instansi.

Lebih lanjut, hasil observasi memperkuat bahwa budaya organisasi di KPU mendukung praktik komunikasi digital yang santun dan inklusif. Dalam grup WhatsApp resmi, misalnya, pegawai menunjukkan sikap saling menghargai dan tidak menggunakan bahasa yang mengandung unsur provokatif atau menyerang pribadi, meskipun dalam kondisi diskusi yang intens. Ini mencerminkan adanya etika komunikasi digital yang telah terbentuk secara kolektif di lingkungan kerja.

Kemampuan untuk memahami dan menghormati latar belakang sosial-budaya rekan kerja dan masyarakat juga memperkuat fungsi pelayanan publik yang dijalankan oleh KPU. Hal ini penting, mengingat KPU memiliki peran besar dalam memastikan informasi pemilu dapat diakses dan dipahami oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Kesadaran ini mendukung penciptaan ruang digital yang aman, nyaman, dan membangun partisipasi publik yang inklusif.

Dengan demikian, dimensi pemahaman budaya dan sosial dalam literasi digital tidak hanya relevan sebagai bentuk etika digital, tetapi juga sebagai penunjang keberhasilan komunikasi

organisasi, pelayanan publik, dan pelaksanaan demokrasi berbasis digital secara menyeluruh di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat.

Dampak Adaptasi Karyawan terhadap Literasi Digital terhadap Kepuasan Kerja

Seiring dengan meningkatnya integrasi teknologi dalam sistem kerja organisasi publik, kemampuan adaptasi terhadap literasi digital menjadi faktor kunci dalam membentuk kepuasan kerja karyawan. Adaptasi yang baik terhadap teknologi digital tidak hanya mencerminkan penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga mencerminkan kesiapan mental, emosional, dan profesional dalam menghadapi perubahan cara kerja yang semakin terdigitalisasi.

Pembahasan ini akan mengulas bagaimana proses adaptasi karyawan di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat terhadap literasi digital berdampak pada tingkat kepuasan mereka dalam bekerja. Dimensi kepuasan kerja yang dimaksud mencakup perasaan percaya diri, kenyamanan, efisiensi kerja, motivasi, serta rasa dihargai sebagai bagian dari organisasi yang bergerak menuju transformasi digital. Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara kemampuan literasi digital dengan meningkatnya rasa kepemilikan, kemandirian, dan penghargaan terhadap peran individu dalam lingkungan kerja digital.

Pembahasan ini juga memperkuat posisi literasi digital sebagai aspek strategis dalam pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga mampu mengalami peningkatan kesejahteraan psikologis dan profesional melalui penggunaan teknologi secara efektif dan produktif.

1. Keamanan digital (*E-safety*)

Keamanan digital (*e-safety*) merupakan salah satu dimensi penting dalam literasi digital yang berperan besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Aspek ini mencakup berbagai tindakan preventif dan strategis yang dilakukan oleh pegawai untuk melindungi data pribadi, informasi lembaga, serta menjaga etika penggunaan teknologi digital dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pegawai telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga keamanan digital. Mereka secara aktif menerapkan langkah-langkah protektif seperti penggunaan password yang kuat, autentikasi dua faktor, pembaruan sandi secara berkala, serta penghindaran akses terhadap tautan yang mencurigakan. Selain itu, pegawai juga menunjukkan kecermatan dalam menyimpan dokumen penting hanya pada server resmi instansi dan tidak menyebarkannya melalui platform yang tidak aman. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa pegawai tidak hanya memahami pentingnya keamanan digital secara teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis terhadap perlindungan data dan informasi kelembagaan.

Menurut Nasionalita & Nugroho (2020), dimensi e-safety dalam literasi digital mencakup jaminan keamanan saat pengguna bereksplorasi, berkreasi, dan berkolaborasi menggunakan teknologi digital. Hal ini diperkuat oleh Hobbs (2011) yang menyatakan bahwa kompetensi literasi digital yang utuh harus mencakup kesadaran akan hak privasi, perlindungan data, dan penggunaan media secara etis dan bertanggung jawab.

Dalam organisasi publik seperti KPU, kesadaran ini menjadi krusial karena setiap kesalahan dalam pengelolaan data dapat berdampak langsung terhadap kredibilitas institusi, terutama dalam proses pemilu yang sangat sensitif terhadap isu keamanan informasi.

Kaitannya dengan kepuasan kerja, penerapan e-safety memberikan rasa aman secara psikologis bagi pegawai. Ketika pegawai merasa bahwa sistem kerja mereka didukung oleh infrastruktur digital yang aman dan mereka memiliki kontrol terhadap keamanan data yang dikelolanya, maka akan tumbuh rasa percaya diri dan kenyamanan dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Anggia et al. (2022) yang menegaskan bahwa literasi digital yang baik

tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kenyamanan dan efisiensi kerja seseorang.

Lebih lanjut, Covello (2010) menyebutkan bahwa keamanan digital merupakan bagian dari kepemimpinan digital dalam organisasi, di mana pimpinan tidak hanya mendorong pemanfaatan teknologi, tetapi juga menanamkan kesadaran akan keamanan siber sebagai bagian dari budaya kerja. Ketika seluruh elemen organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya keamanan digital, maka akan tercipta lingkungan kerja yang lebih kondusif, kolaboratif, dan minim risiko terhadap kebocoran data atau penyalahgunaan informasi. Dari hasil wawancara, pegawai juga merasa lebih dihargai dan termotivasi ketika kemampuan mereka dalam menjaga keamanan digital diakui oleh rekan kerja atau pimpinan. Penguasaan terhadap praktik e-safety dianggap sebagai bentuk kompetensi profesional yang memberikan kontribusi terhadap stabilitas operasional lembaga. Penghargaan ini menambah tingkat kepuasan kerja karena pegawai merasa keberadaannya penting dalam mendukung kelancaran proses kerja berbasis teknologi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa e-safety bukan sekadar komponen teknis dalam literasi digital, tetapi juga berfungsi sebagai pondasi bagi terciptanya kenyamanan, kepercayaan, dan kepuasan kerja dalam organisasi. Di era digital yang penuh risiko siber, kompetensi keamanan digital yang dimiliki pegawai menjadi salah satu modal utama untuk membentuk ekosistem kerja yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan.

2. Berpikir kritis dan evaluasi (*Critical thinking and evaluation*)

Berpikir kritis dan evaluasi merupakan dimensi esensial dalam literasi digital yang mencerminkan kemampuan individu untuk menyaring informasi, menilai validitas sumber, serta membuat keputusan berbasis analisis yang rasional. Dalam lingkungan kerja yang serba digital seperti di KPU Kabupaten Bandung Barat, kemampuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diterima, diolah, dan disebarluaskan memiliki akurasi, relevansi, dan nilai fungsional yang tinggi dalam mendukung proses kerja kelembagaan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, para pegawai menunjukkan tingkat berpikir kritis yang baik dalam menghadapi arus informasi digital. Mereka terbiasa melakukan validasi terhadap informasi yang diterima melalui pencarian sumber resmi, membandingkan data dengan dokumen kelembagaan, dan mendiskusikannya dalam tim sebelum mengambil keputusan atau menyebarkannya lebih luas. Proses ini tidak hanya menunjukkan kemampuan kognitif dalam mengevaluasi informasi, tetapi juga kesadaran terhadap dampak sosial dan kelembagaan dari informasi yang salah atau tidak akurat.

Teori Nasionalita & Nugroho (2020) menegaskan bahwa dimensi *critical thinking and evaluation* dalam literasi digital melibatkan keterampilan untuk menganalisis informasi secara mendalam, membuat penilaian berdasarkan data, dan menggunakan bukti untuk mendukung argumen atau keputusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Naufal (2023) yang menjelaskan bahwa berpikir kritis dalam konteks literasi digital mencakup kemampuan penalaran reflektif untuk mengevaluasi media digital, mempertanyakan motif, serta menganalisis kredibilitas informasi dan konsekuensinya.

Pegawai KPU yang mampu berpikir kritis cenderung lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau manipulasi digital. Hal ini sangat penting dalam konteks kerja publik seperti pemilu, di mana informasi yang salah dapat menimbulkan disinformasi di masyarakat dan merusak kredibilitas lembaga. Oleh karena itu, keterampilan ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih hati-hati, terukur, dan berbasis data, yang pada akhirnya memperkuat integritas kinerja organisasi.

Dalam hubungannya dengan kepuasan kerja, berpikir kritis memberikan rasa percaya diri kepada pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ketika pegawai memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pekerjaan mereka secara objektif dan mengambil keputusan yang tepat, mereka merasa lebih kompeten dan mandiri. Hal ini meningkatkan rasa pencapaian dalam bekerja, yang berujung pada perasaan puas dan bangga atas kontribusinya.

Menurut Anggia et al. (2022), kemampuan berpikir kritis sebagai bagian dari literasi digital berkontribusi dalam membentuk kinerja yang efisien dan memperkaya proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan suasana kerja yang lebih produktif dan bermakna.

Lebih lanjut, Bawden (dalam Lestari et al., 2021) juga menyebutkan bahwa literasi digital yang baik melibatkan kemampuan untuk menyaring dan mengkaji informasi secara kritis sebelum menyebarkannya, serta kemampuan untuk membedakan informasi yang sah dari informasi yang menyesatkan. Pegawai yang memiliki kompetensi ini akan lebih dihargai oleh tim, karena dinilai cermat dan dapat diandalkan dalam menangani isu-isu yang kompleks dan sensitif.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dimensi berpikir kritis dan evaluasi dalam literasi digital tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kerja, tetapi juga memperkuat motivasi intrinsik pegawai. Saat pegawai merasa bahwa kemampuan berpikirnya diakui dan berdampak nyata terhadap keberhasilan kerja tim dan organisasi, maka kepuasan kerja pun meningkat secara signifikan. Di era digital yang penuh dengan dinamika informasi, pegawai yang mampu berpikir kritis menjadi aset penting dalam menjaga akurasi, akuntabilitas, dan kredibilitas kerja institusional.

3. Hasil Kreasi Digital dan Kepuasan terhadap Produktivitas Kerja

Kemampuan dalam menghasilkan produk digital yang relevan dengan kebutuhan kelembagaan merupakan cerminan dari literasi digital yang baik, khususnya dalam dimensi kreativitas dan penguasaan aplikasi kerja digital. Berdasarkan temuan, pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat tidak hanya menguasai perangkat digital secara teknis, tetapi juga mampu menciptakan keluaran digital seperti laporan, presentasi, infografis, dan konten sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik audiens. Kemampuan ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi kerja, fleksibilitas pelaksanaan tugas, serta kepuasan individu terhadap perannya dalam organisasi.

Responden menggambarkan bagaimana penggunaan Excel, PowerPoint, dan Canva mempercepat proses kerja dan meningkatkan akurasi data. Dengan penguasaan tersebut, ia merasa lebih percaya diri dan mandiri, sehingga tidak tergantung pada bantuan pihak lain. Temuan ini memperkuat pendapat Bawden (dalam Lestari et al., 2021), yang menyatakan bahwa salah satu ciri utama dari literasi digital adalah kemampuan untuk menyajikan informasi dengan efektif dan nyaman dalam media digital. Ketika seorang pegawai merasa nyaman dan mampu mengekspresikan ide atau data melalui sarana digital, maka kepercayaan diri dan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan pun meningkat.

Lebih lanjut, responden juga menekankan bahwa penguasaan teknologi digital membuat alur kerja menjadi lebih terstruktur, serta memungkinkan kontribusi yang maksimal, terlepas dari keterbatasan ruang dan waktu. Ini sejalan dengan teori dari Anggia et al. (2022) yang menyatakan bahwa literasi digital memungkinkan individu untuk bekerja secara efisien, fleksibel, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks dunia kerja modern, fleksibilitas yang diberikan oleh teknologi digital tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga memberikan ruang bagi pegawai untuk merasa lebih produktif dan terlibat dalam proses kerja yang kolaboratif.

Responden lainnya juga menyoroti bagaimana fitur-fitur aplikasi digital mendukung pengelolaan waktu dan data secara lebih praktis. Ia merasa bahwa adanya digitalisasi dalam

proses kerja mencegah tumpang tindih tugas, memudahkan dokumentasi, dan memperkuat kolaborasi lintas divisi. Hal ini sejalan dengan pandangan Takariani et al. (2023) yang menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan mengelola informasi, waktu, dan interaksi dalam ruang kerja digital. Kemampuan semacam ini merupakan bagian dari transformasi digital organisasi yang mendukung budaya kerja berbasis inovasi dan efisiensi.

Selain itu, penguasaan teknologi yang menghasilkan produk-produk digital berkualitas turut menciptakan pengakuan sosial dalam lingkungan kerja. Ketika pegawai sering diminta membantu rekan kerja atau dilibatkan dalam proyek strategis karena kompetensinya, maka perasaan dihargai dan dibutuhkan akan meningkat. Dalam teori Herzberg tentang Two-Factor Theory (dikutip dalam Robbins & Judge, 2021), kondisi tersebut termasuk dalam kategori motivator factors, yakni faktor-faktor intrinsik seperti pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab yang memengaruhi kepuasan kerja secara langsung.

Hasil observasi pun mendukung hal ini. Produk digital yang dihasilkan pegawai tidak hanya fungsional, tetapi juga kreatif dan kontekstual. Penggunaan alat seperti Canva, PowerPoint, dan Google Form menjadi bukti bahwa inovasi digital telah menjadi bagian dari budaya kerja. Adaptasi ini meningkatkan koordinasi, mempercepat proses validasi, dan memperkuat sistem kerja berbasis data, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil kreasi digital yang dihasilkan oleh pegawai tidak hanya mencerminkan tingkat literasi digital yang baik, tetapi juga mendorong terbentuknya lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan memuaskan. Penguasaan digital memberi mereka rasa percaya diri, kebebasan berinovasi, dan rasa dihargai tiga elemen kunci dalam menciptakan kepuasan kerja yang berkelanjutan dalam era digital.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Penerapan Pegawai terhadap Literasi Digital dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja: Studi Kasus di KPU Kabupaten Bandung Barat, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan yang menggambarkan bagaimana literasi digital telah menjadi aspek penting dalam mendukung kinerja dan kepuasan kerja pegawai. Penelitian ini mengacu pada tiga fokus utama, yaitu tingkat literasi digital pegawai, proses penerapan teknologi digital dalam lingkungan kerja, serta dampak adaptasi terhadap literasi digital terhadap tingkat kepuasan kerja. Seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi memberikan gambaran menyeluruh sebagai berikut .:

1. Tingkat Literasi Digital Karyawan di KPU Kabupaten Bandung Barat

Tingkat literasi digital pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat tergolong tinggi dan komprehensif. Pegawai menunjukkan penguasaan dalam berbagai dimensi literasi digital, seperti keterampilan fungsional, kemampuan komunikasi digital, pencarian dan seleksi informasi, kreativitas dalam penggunaan aplikasi digital, serta kesadaran akan keamanan digital. Hal ini tercermin dalam kemampuan mereka mengoperasikan perangkat kerja, menggunakan aplikasi seperti Microsoft Office, e-SIDALIH, Google Workspace, hingga memproduksi konten digital yang sesuai dengan kebutuhan audiens dan lembaga. Literasi digital telah menjadi bagian dari rutinitas kerja yang mendukung efisiensi, inovasi, dan efektivitas tugas pegawai.

2. Proses Penerapan Teknologi Digital terhadap Karyawan di Lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat

Penerapan teknologi digital di lingkungan kerja KPU Kabupaten Bandung Barat berlangsung secara bertahap, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pegawai aktif

menggunakan aplikasi digital dalam komunikasi, pengolahan data, dokumentasi, hingga penyusunan materi sosialisasi. Penggunaan teknologi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga membentuk ekosistem kolaboratif lintas divisi melalui platform daring. Adaptasi terhadap teknologi ini ditopang oleh budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi, dukungan manajerial, serta pelatihan informal antarpegawai. Proses ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah meresap ke dalam pola kerja dan struktur organisasi.

3. Dampak Adaptasi Karyawan terhadap Literasi Digital terhadap Kepuasan Kerja

Adaptasi karyawan terhadap literasi digital memberikan dampak positif terhadap kepuasan kerja. Pegawai merasa lebih percaya diri, dihargai, mandiri, dan termotivasi karena penguasaan teknologi digital memungkinkan mereka menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Pengakuan dari rekan kerja serta keterlibatan dalam proyek-proyek strategis berbasis teknologi turut memperkuat rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap pekerjaan. Hasil ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya kompetensi teknis, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan memuaskan secara psikologis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Program Pelatihan Literasi Digital

KPU Kabupaten Bandung Barat disarankan untuk secara berkala menyelenggarakan pelatihan literasi digital yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis dasar, tetapi juga mencakup aspek kreatif, kolaboratif, dan keamanan digital. Pelatihan yang kontekstual dengan tugas-tugas kelembagaan akan membantu meningkatkan kompetensi pegawai secara menyeluruh.

2. Penguatan Dukungan Manajerial dan Fasilitas Teknologi

Pimpinan dan manajemen perlu memberikan dukungan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan, insentif, serta penyediaan infrastruktur digital yang merata di semua divisi. Ketersediaan perangkat yang memadai dan sistem kerja berbasis digital akan memperkuat integrasi teknologi dalam aktivitas harian pegawai.

3. Integrasi Literasi Digital dalam Budaya Organisasi

Disarankan agar nilai-nilai literasi digital seperti berpikir kritis, kolaborasi daring, keamanan informasi, dan adaptasi terhadap teknologi baru dijadikan bagian dari budaya kerja institusi. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi internal, forum diskusi, dan mekanisme berbagi praktik baik antarpegawai.

4. Evaluasi dan Monitoring Berkala

KPU Kabupaten Bandung Barat juga disarankan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap pemanfaatan teknologi digital di lingkungan kerja. Monitoring ini penting untuk mengetahui efektivitas penerapan literasi digital serta menyesuaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan kerja dan perkembangan teknologi.

5. Pengembangan Inovasi Digital Secara Inklusif

Pegawai di setiap lini diharapkan diberikan ruang untuk berinovasi melalui platform digital. KPU dapat mengembangkan wadah ide kreatif atau forum inovasi digital lintas divisi agar tercipta partisipasi aktif dan mendorong peningkatan kepuasan kerja secara kolektif.

REFERENSI

- Aminah, S., & Wardani, D. K. (2021). Digital Transformation of the Government: A Case Study in Indonesia. *Malaysian Journal of Communication*, 45–56.
- Anggia, D., Ramadan, B., & Juhanda, A. (2022). Analisis Kemampuan Literasi Digital Siswa Smp Ditinjau Dari Penggunaan Aplikasi Mobile Learning Pada Konsep Sistem Peredaran

- Darah Manusia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*. Vol 8(4), 66.
- Apriyani, R., Megasari, M., & Adji, W. H. (2022). Pengaruh Pelatihan Berbasis Digital terhadap Kemampuan Kerja Karyawan di Era 4.0: Studi Kasus terhadap Karyawan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3785–3790.
- Armstrong, & Stephen. (2020). *Armstrong's Handbook of Job Satisfaction Management Human Resource*.
- Covello, S. (2010). *A Review of Digital Literacy in the 21st Century*. Syracuse University.
- Fadhillah, D., Eryanto, H., & Monoarfa, T. A. (2024). Analisis Literasi Digital dalam Upaya Meningkatkan Kinerja pada Karyawan Sudin Nakertransgi Jakarta Timur. *Administratus*, 164–174. <https://doi.org/10.56662/administratus.v8i3.264>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*.
- Hobbs, R. (2011). *Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom*. Corwin.
- Iswanto, Miskan, & Zohandy. (2023). Transformasi Digital Sektor Publik: Analisis Literasi Digital Aparatur Pemerintah di Desa Kepatihan, Kabupaten Gresik. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 123–137.
- Jamuan, Y. M. (2018). Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Mission*, Vol 10(1), 48.
- Khasanah, U., & Herina. (2019). Membangun Karakter Siswa Melalui Literasi Digital Dalam Menghadapi Pendidikan Abad (Revolusi Industri). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*.
- Lestari, F. D., Ibrahim, M., Ghufro, S., Pance, & Mariati. (2021). Pengaruh Budaya Literasi Terhadap Hasil Belajar Ipa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5.6.
- Luthans, F. (2019). *Employee Job Satisfaction, Concept Company, Toronto, Controversies and Applications*. Prentice Hall International Book.
- Mustofa, & B.Heni, B. (2019). Proses Literasi Digital Terhadap Anak: Tentang Pendidikan Anak Zaman Now. *Jurnal Kajian Informasi*. Vol 11(1), 115.
- Nasionalita, K., & Nugroho, C. (2020). Indeks Literasi Digital Generasi Milenial Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Naufal, H. A. (2023). Literasi Digital Memahami Literasi Digital Teknologi Digital. *Jurnal Perspektif*, 198–199.
- Nurjanah, E., Rusmana, A., & Yanto, A. (2017). Hubungan Literasi Didital Dengan Kualitas Penggunaan E-Resources. *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*.
- Reusi, A. P. (2019). Ekspresi Vlogger Melalui Media Vlog Di Kota Bandung (Studi Deskriptif Kualitatif Ekspresi Vlogger Melalui Media Vlog Di Komunitas Youtube Creator Bandung). *Skripsi*.
- Shidqi, M. F., Darmastuti, I., & Wicaksono, B. S. (2023). Pengaruh Digitalisasi Sistem Perusahaan terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang). *Diponegoro Journal of Management*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/38828>
- Soleh, A. M., Oka, I. G. A. A., & Kristiawan, M. (2020). Kondisi Literasi Media Digital dalam Aktivitas Kerja Pegawai Politeknik Penerbangan Palembang. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 212–219.
- Sriwijaya, U., & Palangkaraya, U. (2023). *Profil Literasi Digital Mahasiswa Di Era Digitalisasi*. 50–57.
- Sudaryo, Y., Aribowo, A., & Sofiati, N., A. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*,

- Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*. Penerbit Andi.
- Sulistya, I., & Wahidi, A. (2024). Penerapan Literasi Media dalam Keterampilan Pemanfaatan Media pada Era Teknologi Informasi di Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. *DE FACTO: Journal of International Multidisciplinary Science*, 34–42.
- Sutrisno, B. (2021). Peran Literasi Digital dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Transformasi Digital*, 45–60.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group.
- Takariani, C. S. D., Sari, D., Anastasia, ristania R., Pangaribuan, & Simatupang, O. (2023). Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pekommas*, 48.
- UNESCO. (2018). *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2*. UNESCO Institute for Statistics.
- Wibowo. (2021). *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada.